

EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA PACUNG, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG)

¹Putu Ari Oktaviani¹ dan I Nyoman Suprpta²

Email : putuarioktaviani23@gmail.com¹ dan nym.suprpta@unipas.ac.id²

Abstraksi

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi rentan yang terdampak kondisi sosial dan ekonomi. Keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai upaya perlindungan sosial, pemerintah melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Untuk mengkaji masalah penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, menjelaskan dengan mendeskripsikan hasil pengolahan data tersebut sehingga mudah dipahami dan memanfaatkan analisis data model interaktif.

Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan BLT di Desa Pacung tergolong cukup efektif. Penetapan penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan musyawarah desa sehingga relatif tepat sasaran. Bantuan yang diberikan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meskipun belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas program meliputi akurasi data penerima, koordinasi antarperangkat desa, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dalam penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disampaikan saran agar pemerintah desa secara rutin melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran, meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat, serta memperkuat koordinasi dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Selain itu, diperlukan upaya pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar bantuan yang diterima tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara lebih berkelanjutan, salah satunya dengan pengembangan program (PKTD) Padat Karya Tunai Desa.

Kata Kunci: Kemiskinan, Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai, Kesejahteraan Masyarakat.

¹Mahasiswa Universitas Panji Sakti

²Pengajar Universitas Panji Sakti

1. Pendahuluan

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia yang diwujudkan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. BLT bertujuan meningkatkan daya beli agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Dalam perspektif kesejahteraan, BLT dinilai mampu meningkatkan kondisi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan akses layanan dasar, sehingga efektivitasnya dapat diukur dari perubahan sosial ekonomi penerima manfaat.

Pelaksanaan BLT Dana Desa telah diatur melalui berbagai regulasi terkait kriteria penerima, mekanisme penyaluran, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, serta permasalahan administrasi yang menunjukkan perlunya evaluasi program.

Di Desa Pacung, penyaluran BLT telah mengikuti mekanisme yang berlaku, tetapi masih ditemukan masalah seperti ketidakakuratan data, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterlambatan distribusi. Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng cenderung menurun, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi BLT agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan penelitian Irfan Sofi (2021) serta Ratna Dewi dan Habib Furqoni Andrianus (2021), Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbukti efektif dalam membantu pemulihan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan daya beli serta konsumsi rumah tangga masyarakat miskin, khususnya bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian dan tidak menerima bantuan sosial lainnya. Pelaksanaan BLT Desa dinilai berjalan efektif dan efisien karena telah mengacu pada aturan serta melibatkan musyawarah desa dalam penentuan penerima, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian data penerima, dan infrastruktur penyaluran yang belum memadai.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Udayana dan Sukraaliawan (2021) yang menyatakan bahwa BLT Dana Desa merupakan bentuk kebijakan perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin terdampak kondisi ekonomi guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan BLT tidak terlepas dari pemanfaatan Dana Desa sebagai sumber utama pendanaan. Sudianing dan Sandiasa (2020) menyatakan bahwa Dana Desa berperan penting dalam menunjang program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, BLT tidak hanya bersifat bantuan sosial semata, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, BLT memberikan dampak positif tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, walaupun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga kebutuhan pokok.

2.2 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta keterbatasan akses dan partisipasi sosial. Bappenas (2005) mendefinisikannya sebagai ketidakmampuan memenuhi hak hidup layak, sedangkan Suparlan (1995) melihatnya sebagai rendahnya standar hidup akibat kekurangan materi. Pendapat lain menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (Niemiets, 2011 dalam Maipita, 2014) serta kebutuhan makanan dan non-makanan (BPS, 2016). Kemiskinan juga diukur melalui indikator seperti Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Poverty Severity Index. Secara umum, kemiskinan dapat disimpulkan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan hidup secara layak.

2.3 Dampak kemiskinan

Menurut Michael Todaro dan Stephen C. Smith (2020), kemiskinan berdampak pada rendahnya investasi pendidikan sehingga meningkatkan risiko putus sekolah dan rendahnya capaian akademik. Amartya Sen menekankan bahwa kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang layak, sementara World Health Organization (2022) menyebut kemiskinan sebagai faktor utama yang memengaruhi kesehatan akibat terbatasnya akses gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, kemiskinan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan memerlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga kesejahteraan secara menyeluruh.

2.4 Jenis dan Ukuran kemiskinan

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan subjektif dan objektif, di mana kemiskinan subjektif berkaitan dengan perasaan individu, seseorang merasa miskin atau kaya tanpa melihat kondisi nyata, sedangkan kemiskinan objektif merupakan kondisi yang tampak secara sosial dan

dinilai berdasarkan standar umum masyarakat. Selain itu, menurut Robert Chambers dan Khomsan dkk. (2015), kemiskinan juga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kemiskinan absolut (ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sesuai garis kemiskinan), kemiskinan relatif (kesenjangan pendapatan dibanding masyarakat sekitar), dan kemiskinan struktural (kemiskinan akibat sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil). Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dilihat dari kondisi ekonomi, tetapi juga persepsi individu dan struktur sosial yang memengaruhinya.

2.5 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abdul Wahab, 1991) serta menjadi pedoman dalam kepentingan umum. Analisis kebijakan seperti BLT dapat menggunakan SWOT (Freddy Rangkuti, 2018) yang mencakup kekuatan (penyaluran cepat), kelemahan (data tidak akurat), peluang (dukungan teknologi), dan ancaman (inflasi dan penyalahgunaan) guna meningkatkan efektivitas kebijakan.

2.6 Efektivitas Bantuan Langsung Tunai

Efektivitas program merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana dikemukakan oleh Makmur (2011), yang menilai efektivitas melalui ketepatan waktu, biaya, sasaran, perhitungan, tujuan, dan pemikiran. Dalam konteks BLT, efektivitas dipengaruhi oleh ketepatan penyaluran, dampak terhadap kesejahteraan, serta evaluasi berkelanjutan (Creswell, 2023). Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial turut menentukan keberhasilan program. Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, sehingga efektivitas BLT bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan sesuai sasaran.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data dikumpulkan

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses penyaluran BLT, faktor pendukung dan penghambat, serta sejauh mana program tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria yang relevan dan memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan BLT, seperti aparat desa, pelaksana program, dan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, digunakan juga snowball sampling untuk menambah informan berdasarkan rekomendasi sebelumnya. Melalui teknik ini, data yang diperoleh diharapkan lebih mendalam, akurat, dan mampu menggambarkan secara komprehensif efektivitas pelaksanaan program BLT di lapangan.

Adapun fokus penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, adapun yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana efektifitas BLT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Pacung. (2) Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas BLT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Pacung. (3) Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas BLT agar lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Analisis data penelitian kualitatif dimulai sejak peneliti mengumpulkan data, dimana data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Efektivitas BLT

Efektivitas kebijakan publik diukur dari keberhasilan mencapai tujuan, seperti peningkatan kesejahteraan serta ketepatan sasaran, waktu, dan biaya. Dalam pelaksanaan BLT di Desa Pacung, program ini dinilai cukup efektif karena membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga daya beli, meskipun masih bersifat bantuan jangka pendek. Penilaian ini didukung oleh aparat desa dan sejalan dengan Makmur (2011) yang menekankan bahwa keberhasilan

suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, tetapi juga oleh tingkat ketepatan dalam enam aspek utama, yaitu ketepatan waktu, biaya, sasaran, perhitungan, tujuan, dan pemikiran dalam proses implementasinya.

4.1.1 Ketepatan Waktu

Efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam aspek ketepatan waktu, merupakan indikator penting yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Waruwu, 2016; Astuti, 2019). Penyaluran BLT di Desa Pacung dinilai tepat waktu, umumnya dilakukan pada awal bulan dan sebelum tanggal 10 meskipun terdapat kendala geografis. Distribusi langsung ke rumah penerima, terutama bagi lansia, meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan masyarakat. Bantuan juga diterima tertib, sesuai jadwal, dan bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari, sehingga indikator ketepatan waktu menurut Makmur (2011) telah terpenuhi dan menunjukkan program berjalan efektif.

4.1.2 Ketepatan Biaya

Ketepatan biaya merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas BLT, yang mencerminkan kesesuaian antara anggaran dan realisasi serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat menerima Rp300.000 per bulan atau Rp3.600.000 per tahun tanpa pemotongan, sehingga memenuhi prinsip value for money (Frederickson, 2020) dan efisiensi tata kelola (Ferlie, 2018). Hal ini sejalan dengan Mahmudi (2020) dan Bastian (2010), sehingga penyaluran BLT dinilai telah berjalan optimal dan bertanggung jawab.

4.1.3 Ketepatan Sasaran

Menurut William N. Dunn (2018) dan Riant Nugroho (2021), efektivitas kebijakan ditentukan oleh ketepatan sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, penetapan penerima BLT dilakukan melalui pendataan, verifikasi, dan musyawarah desa yang disinkronkan dengan data DTKS serta memprioritaskan kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan penderita sakit menahun. Mekanisme ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan BLT dinilai telah tepat sasaran dan berjalan efektif.

4.1.4 Ketepatan Perhitungan

Ketepatan perhitungan anggaran merupakan aspek penting dalam efektivitas program, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), Mahmudi (2020), dan Indra Bastian (2017; 2024) yang menekankan akurasi, transparansi, dan prinsip value for money. Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan BLT dilakukan secara sistematis sesuai jumlah KPM dan ketentuan bantuan, disertai verifikasi data, pencatatan, serta mekanisme perubahan yang resmi. Hal ini menunjukkan perhitungan anggaran telah dilakukan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung efektivitas program.

4.1.5 Ketepatan Tujuan

Ketepatan tujuan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas BLT, yaitu kesesuaian antara tujuan program dengan kondisi penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan Sondang P. Siagian (2020), Makmur (2011), dan William N. Dunn (2018) yang menekankan keberhasilan program dilihat dari tercapainya tujuan. Berdasarkan hasil wawancara, BLT disalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu melalui verifikasi dan musyawarah desa. Bantuan ini terbukti membantu memenuhi kebutuhan pokok dan kesehatan, sehingga pelaksanaannya dinilai telah tepat tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4.1.6 Ketepatan Pemikiran

Ketepatan pemikiran merupakan indikator penting efektivitas BLT, yang mencerminkan kesesuaian antara analisis kebijakan dan kondisi nyata masyarakat. Hal ini sejalan dengan Makmur (2011) dan William N. Dunn (2018) yang menekankan pentingnya pertimbangan yang rasional dan sistematis dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara, penetapan penerima BLT dilakukan melalui observasi, verifikasi lapangan, dan musyawarah desa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kesehatan, dan tanggungan keluarga. Dengan demikian, pelaksanaan BLT dinilai telah memenuhi ketepatan pemikiran karena didasarkan pada analisis objektif dan kondisi riil masyarakat.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Blt Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pacung

4.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan BLT berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn (2018). Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga faktor utama, yaitu 1) kedekatan sosial antarwarga yang membantu memahami kondisi riil masyarakat. 2) penyaluran bantuan secara langsung dan personal terutama bagi kelompok rentan, serta 3) fleksibilitas pemerintah desa dalam menyesuaikan kondisi lokal dengan tetap berpedoman pada aturan. Ketiga faktor tersebut saling mendukung dalam menciptakan penyaluran yang lebih tepat sasaran, adil, dan efektif, sehingga tujuan program BLT dapat tercapai secara optimal.

4.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan BLT dapat memengaruhi efektivitas kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh William N. Dunn (2018). Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga kendala utama, yaitu 1) Perubahan dan pembaruan data yang kompleks sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran, 2) Keterbatasan anggaran yang membatasi jumlah penerima, serta 3) Kecemburuan sosial akibat

Locus Majalah Ilmiah FIA_Unipas Vol 18 No. 2 – Agustus 2026 | 73

perbedaan persepsi kelayakan bantuan. Ketiga faktor tersebut menunjukkan adanya tantangan administratif, sumber daya, dan sosial yang perlu dikelola dengan baik agar pelaksanaan BLT tetap efektif dan tepat sasaran.

4.3 Strategi Yang Tepat Untuk Meningkatkan Efektivitas BLT Agar Lebih Optimal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan strategi pemanfaatan Dana Desa yang tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif. Pendekatan cash-for-work terbukti mampu menurunkan kemiskinan dan meningkatkan daya beli, dengan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan hasil wawancara, BLT dinilai efektif untuk kebutuhan dasar namun bersifat sementara, sehingga dikombinasikan dengan PKTD yang melibatkan masyarakat usia produktif dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, PKTD menjadi pendekatan yang lebih berkelanjutan karena tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga meningkatkan pendapatan, keterampilan, dan ekonomi lokal.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada data empiris dan didukung oleh analisis yang mendalam, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan BLT di Desa Pacung menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama karena ketepatan sasaran pada kelompok rentan serta kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Efektivitas BLT dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran yang terjadwal, dan partisipasi masyarakat, serta faktor penghambat berupa dinamika data, keterbatasan kuota penerima, dan potensi kecemburuan sosial.

3. Peningkatan efektivitas BLT dapat dilakukan melalui strategi integratif, seperti pembaruan data secara berkala, prioritas kepada kelompok rentan, serta sinergi dengan program pemberdayaan seperti Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan koordinasi kelembagaan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berbagai temuan yang diperoleh di lapangan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi evaluasi sekaligus langkah perbaikan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya dalam mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas pendataan serta penyaluran bantuan.

1. Diperlukan pembaruan dan evaluasi data penerima BLT secara berkala untuk menjamin ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas program.
2. Optimalisasi faktor pendukung dan penanganan faktor penghambat perlu dilakukan melalui peningkatan akurasi data, pengelolaan kuota secara selektif, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Perlu diterapkan sistem graduasi penerima dan integrasi dengan program pemberdayaan, disertai penguatan mekanisme monitoring dan transparansi guna meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan program BLT.

Daftar Pustaka

Antara News Bali. (2024). *Desa Pacung di Buleleng gencarkan akses internet untuk warga*. Antara News Bali.

Awalia, S., & Sumayya, S. A. (2024). Analisis efektivitas program bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik (JEKP)*, **11**(2), 123–134.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. (2024). *Kabupaten Buleleng dalam angka 2024*. Singaraja: BPS Kabupaten Buleleng.

- BudayaBali.com. (2023). *Ngerebeg of Tegallalang Village: A sacred tradition for the harmony of bhuana alit and bhuana agung*. Budaya Bali.
- BudayaBali.com. (2023). *Pura Ponjok Batu: The history of the temple with traces of stone boat relics in Buleleng Regency*. Budaya Bali.
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bulelengkab.go.id. (2023). *Pura Segara Taman Beji Ponjok Batu tempat melukat dan mensucikan diri*. Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005–2015. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, **15**(2), 1–12.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. (2022). *Sejarah Pura Ponjok Batu Buleleng*. Disbud Buleleng.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasrin, L. O. M. A. (2021). *Implementasi program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Wakorambu (Skripsi)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Jadesta Kemenparekraf. (2023). *Profil Desa Wisata Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, **9**(2). Universitas Sam Ratulangi Manado

- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Desa Pacung. (2023). *Profil Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. Pacung: Pemerintah Desa Pacung.
- Pemerintah Desa Pacung. (2023). *Profil Desa Pacung*. Website Resmi Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Pemerintah Desa Pacung. (2023). *Sejarah Desa Pacung*. Website Resmi Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Pemerintah Kecamatan Tejakula. (2023). *Pura Ponjok Batu sebagai destinasi religi dan sejarah*. Pemerintah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Republik Indonesia: Kementerian Keuangan.
- Rasyid, M. Ryaas. 2014. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT MIPI Press.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robbins, Stephen P., & Coulter, Mary. 2016. *Management*. New Jersey: Pearson.
- Rusdarti, R., & Sebayang, L. K. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, 9(1), 1–9.
- Sen, A. (2019). *The idea of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262.
- Sudianing, N. K., & Sandiasa, G. (2020). *Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Program Inovasi Desa*. *Jurnal LOCUS FIA UNIPAS*, 12(2).

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Tumija. (2024). Jurnal ekonomi dan keuangan publik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, **11**(2).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Udayana, I. M. A., & Sukraaliawan, I. N. (2021). *Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19*. Jurnal LOCUS FIA UNIPAS, 13(2).
- VisitBali.id. (2023). *Ngerebeg tradition: Body painting rituals to neutralize bad traits*. Visit Bali.
- Wa Ode Yama, Rusli, M., & Tanzil. (2021). Implementasi program bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19. *Gemeinschaft: Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan*, **3**(1), 124–125.
- Wikipedia contributors. (2024). Bantuan langsung tunai. *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*.
- World Health Organization. (2022). *Poverty and health*. Geneva: World Health Organization.